

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Konsep Budaya Politik

Salah satu kata yang mungkin paling sulit didefinisikan dalam khazanah akademis adalah kata budaya (*culture*). Salah satu sebabnya bisa jadi karena sifatnya yang begitu dinamis, sehingga cenderung sulit ditangkap dan digeneralisasikan dalam definisi ketat-ilmiah. Kata budaya yang memiliki makna begitu dinamis ini, secara semantik berasal dari bahasa Sanskerta; *buddhayahyang* merupakan bentuk jamak dari kata “*buddhi* “ , yang berarti budi atau akal. Atau bisa kita definisikan budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat.<sup>1</sup> Namun, setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya, seperti antara masyarakat umum dengan para elitnya. Seperti juga di Indonesia, menurut Benedict R. O'G Anderson, kebudayaan Indonesia cenderung membagi secara tajam antara kelompok elite dengan kelompok massa.<sup>2</sup>

Budaya Politik adalah aspek politik dari sistem nilai nilai yang terdiri dari ide, pengetahuan, adat istiadat, tahayul, dan mithos. Atau juga bisa disebut “ideologi” , karena bisa di anggap sama, yang artinya sikap mental, pandangan hidup dan struktur

---

<sup>1</sup> Komarudin Sahid, *Memahami Budaya Politik*, (Cet.I Bogor;Ghalia Indonesia 2011) h.147-148

<sup>2</sup> A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, (Cet.I Yograyakarta;Graha Ilmu 2007)h.3

pemikiran, disini menekankan ideologi umum berlaku di masyarakat, bukan ideologi perorangan yang bersifat sering khusus dan beragam. Sementara itu, menurut Gabriel Almond, budaya politik dilihat dari orientasinya ada 3 bentuk, yang pertama Budaya politik parokial dimana kesadaran obyek politiknya kecil atau tidak ada sama sekali terhadap sistem politik. Kelompok ini akan ditemukan di berbagai lapisan masyarakat. Yang kedua, Budaya politik kaula adalah mereka yang berorientasi terhadap sistem politik dan pengaruhnya terhadap outputs yang mempengaruhi kehidupan mereka seperti tunjangan sosial dan hukum. Namun mereka tidak berorientasi terhadap partisipasi dalam struktur inputs. Dan yang terakhir, Budaya politik partisipan adalah individu yang berorientasi terhadap struktur inputs dan proses dan terlibat didalamnya atau melihat dirinya sebagai potensial terlibat, mengartikulasikan tuntutan dan membuat keputusan.

Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu<sup>3</sup>. Dengan kata lain, bagaimana distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik diantara masyarakat bangsa itu. Lebih jauh mereka menyatakan, bahwa warga negara senantiasa mengidentifikasikan diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki. Dengan orientasi itu pula

---

<sup>3</sup>Almond, Gabriel A., dan Sidney Verba. 2005. *Budaya Politik, Tingkah Laku, Politik, dan Demokrasi di Lima Negara* (Cet 3, Jakarta; Bumi Aksara 2005) h.3

mereka menilai serta mempertanyakan tempat dan peranan mereka di dalam sistem politik<sup>4</sup>

Berikut ini adalah beberapa pengertian budaya politik yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk lebih memahami secara teoritis sebagai berikut :

a. Budaya politik adalah aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, tahayul, dan mitos. Kesemuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Budaya politik tersebut memberikan rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain.

b. Budaya politik dapat dilihat dari aspek doktrin dan aspek generiknya. Yang pertama menekankan pada isi atau materi, seperti sosialisme, demokrasi, atau nasionalisme. Yang kedua (aspek generik) menganalisis bentuk, peranan, dan ciri-ciri budaya politik, seperti militan, utopis, terbuka, atau tertutup. Hakikat dan ciri budaya politik yang menyangkut masalah nilai-nilai adalah prinsip dasar yang melandasi suatu pandangan hidup yang berhubungan dengan masalah tujuan.

c. Bentuk budaya politik menyangkut sikap dan norma, yaitu sikap terbuka dan tertutup, tingkat militansi seseorang terhadap orang lain dalam pergaulan masyarakat. Pola kepemimpinan (konformitas atau mendorong inisiatif kebebasan), sikap terhadap mobilitas (mempertahankan *status quo* atau mendorong mobilitas), prioritas kebijakan (menekankan ekonomi atau politik).

---

<sup>4</sup>Ibid.H.12

Tipe Tipe Budaya Politik, antara lain:<sup>5</sup>

1. Berdasarkan Sikap Yang Ditunjukkan

Pada negara yang memiliki sistem ekonomi dan teknologi yang kompleks, menuntut kerja sama yang luas untuk memperpadukan modal dan keterampilan. Jiwa kerja sama dapat diukur dari sikap orang terhadap orang lain. Pada kondisi ini budaya politik memiliki kecenderungan sikap "militan" atau sifat "toleransi".

a. Budaya Politik Militan

Budaya politik dimana perbedaan tidak dipandang sebagai usaha mencari alternatif yang terbaik, tetapi dipandang sebagai usaha jahat dan menantang. Bila terjadi krisis, maka yang dicari adalah kambing hitamnya, bukan disebabkan oleh peraturan yang salah, dan masalah yang mempribadi selalu sensitif dan membakar emosi.

b. Budaya Politik Toleransi

Budaya politik dimana pemikiran berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai, berusaha mencari konsensus yang wajar yang mana selalu membuka pintu untuk bekerja sama. Sikap netral atau kritis terhadap ide orang, tetapi bukan curiga terhadap orang.

---

<sup>5</sup> Ibid h.18-20

Jika pernyataan umum dari pimpinan masyarakat bernada sangat militan, maka hal itu dapat menciptakan ketegangan dan menumbuhkan konflik. Kesemuanya itu menutup jalan bagi pertumbuhan kerja sama. Pernyataan dengan jiwa toleransi hampir selalu mengundang kerja sama. Berdasarkan sikap terhadap tradisi dan perubahan. Budaya Politik terbagi atas :<sup>6</sup>

a. Budaya Politik Yang memiliki Sikap Mental Absolut

Budaya politik yang mempunyai sikap mental yang absolut memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang dianggap selalu sempurna dan tak dapat diubah lagi. Usaha yang diperlukan adalah intensifikasi dari kepercayaan, bukan kebaikan. Pola pikir demikian hanya memberikan perhatian pada apa yang selaras dengan mentalnya dan menolak atau menyerang hal-hal yang baru atau yang berlainan (bertentangan). Budaya politik yang bernada absolut bisa tumbuh dari tradisi, jarang bersifat kritis terhadap tradisi, malah hanya berusaha memelihara kemurnian tradisi. Maka, tradisi selalu dipertahankan dengan segala kebaikan dan keburukan. Kesetiaan yang absolut terhadap tradisi tidak memungkinkan pertumbuhan unsur baru.

b. Budaya Politik Yang memiliki Sikap Mental Akomodatif

Struktur mental yang bersifat akomodatif biasanya terbuka dan sedia menerima apa saja yang dianggap berharga. Ia dapat melepaskan ikatan tradisi, kritis terhadap diri sendiri, dan bersedia menilai kembali tradisi berdasarkan perkembangan masa kini.

---

<sup>6</sup> Ibid. h. 18

Tipe absolut dari budaya politik sering menganggap perubahan sebagai suatu yang membahayakan. Tiap perkembangan baru dianggap sebagai suatu tantangan yang berbahaya yang harus dikendalikan. Perubahan dianggap sebagai penyimpangan. Tipe akomodatif dari budaya politik melihat perubahan hanya sebagai salah satu masalah untuk dipikirkan. Perubahan mendorong usaha perbaikan dan pemecahan yang lebih sempurna.

## 2. Berdasarkan Orientasi Politiknya

Realitas yang ditemukan dalam budaya politik, ternyata memiliki beberapa variasi. Berdasarkan orientasi politik yang dicirikan dan karakter-karakter dalam budaya politik, maka setiap sistem politik akan memiliki budaya politik yang berbeda. Perbedaan ini terwujud dalam tipe-tipe yang ada dalam budaya politik yang setiap tipe memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

Dari realitas budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat, Gabriel Almond mengklasifikasikan budaya politik sebagai berikut :<sup>7</sup>

- a. Budaya politik parokial(*parochial political culture*), yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah).
- b. Budaya politik kaula(*subyek political culture*), yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju (baik sosial maupun ekonominya) tetapi masih bersifat pasif.

---

<sup>7</sup> Ibid.h.19

c. Budaya politik partisipan(*participant political culture*), yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi.<sup>8</sup>

Dalam konteks indonesia, yang bisa dikatakan sebagai negara majemuk dalam arti budaya dan geografinya, keanekaragaman tersebut sudah pasti membawa pengaruh yang besar pada budaya politik bangsa kita. Menurut Herbert Feith yang dikutip Nazaruddin Samsudin (1991), Indonesia mempunyai dua budaya politik yang dominan. Yakni aristokrasi jawa dan wiraswasta islam.<sup>9</sup>Sebenarnya yang di katakan Feith tentang budaya politik lebih tepat disebut budaya politik subnasional atau subnasional politik indonesia, sebab aristokrasi jawa dan wiraswasta islam serta budaya-budaya politik yang lain merupakan bagian dari budaya politik indonesia.<sup>10</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh Clifford Geertz (1983), yang mengelompokkan masyarakat indonesia atas subbudaya politik. Yaitu santri, abangan , dan priyayi. Sementara , Yahya Muhaimin (1991) mengatakan, di Indonesia mempunyai pola-pola budaya politik yang bersifat dualisme.

Pendapat-pendapat yang dikatakan para ahli dari Barat tidak bisa begitu saja diterima karena konsep-konsep yang diajukan dilihat dari sudut pandang mereka sebagai orang asing. Walaupun demikian, itu hal yang diakui bahwa gambaran-gambaran yang diajukan tersebut memperlihatkan betapa bedanya sub-subbudaya politik yang ada di Indonesia.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid.,

<sup>9</sup> Komarudin Sahid, *Memahami Sosiologi Politik*, (Cet I;Bogor,Ghalia Indonesia 2011) h.160

<sup>11</sup> Ibid,. 161

Pernyataan ini mengandung arti bahwa, apa yang disebut budaya politik nasional adalah kombinasi antara semua subbudaya politik. Baik dari pengelompokan sosiokultural yang dikemukakan oleh Feith dan Geertz maupun budaya politik daerah yang di angkat ke tingkat nasional oleh para pelaku politik. Budaya politik daerah yang di bawa ke tingkat nasional oleh para pelaku politik menyebabkan terjadinya interaksi antara subbudaya politik. Interaksi yang terjadi bisa berbentuk kerja sama, persaingan, bahkan pertarungan politik.

Hasil Interaksi antara adat dan agama menentukan masing-masing unsur adat dan agama dalam proses pematangan pada tingkat subbudaya politik sehingga ada daerah yang budaya politiknya menonjolkan nilai-nilai keagamaan dan ada daerah dimana adat menjadi faktor utama bentuk orientasi politik masyarakatnya. Ketergantungan antara agama dan adat dapat dilihat manakala adat membutuhkan argumentasi mengapa harus berfungsi sedemikian rupa di dalam masyarakat melalui lembaga-lembaha kemasyarakatan. Pembeneran yang dilakukan oleh nilai-nilai agama terhadap adat dapat diketahui dalam kasus bagaimana seorang sultan (di daerah yang beragama Islam) menyelenggarakan kekuasaannya sehingga keterkaitan agama dan adat sebagai karakter budaya politik daerah-daerah di Indonesia tercermin dalam konsep kekuasaan yang hidup di masing-masing daerah.<sup>12</sup>

Kombinasi yang dihasilkan dari pertemuan antara agama dan adat sangat bervariasi. Adat yang bersifat “keras” jika bertemu dengan unsur agama yang

---

<sup>12</sup> Ibid,.163

berkualitas “keras” akan melahirkan subbudaya politik yang “keras” pula. Kemungkinan lain unsur agama yang “keras” bila berhasil dikuasai oleh unsur adat yang “lunak” dapat menonjolkan budaya politik yang “lunak” atau setidaknya tidaknya berkurang kadar “kekerasannya”

### **Indikator**

Indikator yang disampaikan oleh Miriam Budiarjo yakni kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Dalam konteks orientasi budaya politik, indikatornya sebagai berikut :Orientasi Politik, Kesadaran Politik, dan Sosialisasi Politik

### **B. Konsep Kaum Santri**

Istilah santri yang mula-mula dan biasanya memang dipakai untuk menyebut murid yang mengikuti pendidikan islam, merupakan perubahan bentuk dari kata India *shastri* yang berarti orang yang tahu kitab-kitab suci (Hindu).<sup>13</sup> Adapun kata *shastri* diturunkan dari kata *shastra* yang berarti kitab suci, atau karya keagamaan atau karya ilmiah. Dalam hubungan ini, kata jawa *Pesantren* , yang diturunkan dari kata santri dengan dibubuhi awalan pe- dan akhiran *-an* , berarti sebuah pusat pendidikan islam tradisional atau sebuah pondok untuk para siswa muslim sebagai model sekolah

---

<sup>13</sup> Zaini Muchtarom, *Islam di Jawa dalam Perspektif Santri & Abangan*, (Cet I Jakarta;Salemba Diniyah 2002) h.12

agama islam di jawa. Guru pesantren disebut *Kyai* , yaitu orang tua yang dihormati atau guru agam yang mandiri atau berwibawa. Istilah santri sering dipakai untuk mengacu kepada para siswa sekolah agama yang disebut *pesantren* , seperti *penyantren* di Madura, *pondok* di Pasundan, *nangkang meunasah* di Aceh dan *surau* di Minangkabau.<sup>14</sup>

Santri berdasarkan peninjauan tindak langkahnya adalah orang yang berpegang teguh dengan al-Qur'an dan mengikuti sunnah Rasul saw. dan teguh pendirian. Ini adalah arti dengan bersandar sejarah dan kenyataan yang tidak dapat diganti dan diubah selama-lamanya.(Hadlratu Syaikh KH Hasani Nawawi). Kalau pesantren dianggap fenomena, berarti entri pesantren sendiri, santri, lebih fenomenal.

Di berbagai pentas, baik politik dengan panggung atau non panggung, santri adalah aktifis dengan berbagai macam latar belakang plus budaya yang berbeda. Tidak berlebihan, mungkin, bila M. Mahbub Djunaidi mengidentikkan kaum Hippies, dengan kaum santri. Karena Hippies memiliki corak khas dengan tiga keunikan; life pattern, Mores dan internal authority. Sebab inilah Abdurrahman Wahid memasukkan pesantren sebagai subkultur dengan memiliki tiga keunikan juga; cara hidup, pandangan hidup dan tata nilai yang diikuti. Dengan tiga keunikan tersebut pesantren memiliki gaya hidup yang beda dengan lazimnya.<sup>15</sup>

Definisi santri yang telah dirumuskan oleh KH Hasani Nawawi di atas memiliki arah pada tiga ideologi tersebut, karena definisi santri ini memiliki tiga unsur inti. Pertama, berpegang teguh pada Al-Qur'an (hablillah al-matin). Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id al-Khudri Rasulullah berkata Kitab

---

<sup>14</sup> Ibid, h.14

<sup>15</sup> Muh. Saliman, "Meretas Santri Abangan" , <http://www.sidogiri.net>

Allah (al-Qur'an) adalah tali Allah (hablullah). Dalam hadits lain Rasulullah bersabda Al Qur'an adalah hablullah yang tidak akan habis kajaibannya. Lebih jelas lagi dalam QS Ali Imron 1-3 Allah berfirman berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah (hablullah) dan jangan bercerai-berai. Izzuddin bin Abdus Salam berpendapat bahwa Al-Qur'an dikatakan hablullah (tali Allah) karena bisa menyelamatkan orang yang berpegang teguh dengannya dari mala petaka seperti tali bisa menyelamatkan pemegangnya dari jatuh ke dalam sumur dsb. Jadi, definisi santri yang rumuskan oleh KH Hasani Nawawi ini lebih mengedepankan prinsip secara esoteris dari pada indikasi eksoteris, karena keteguhan terhadap tiga unsur ini harus dilandasi dengan tiga ideologi tersebut. Dengan demikian status santri bisa disandang oleh siapapun saja dengan tidak harus berada di dalam pesantren (santri ekologi), namun juga bisa disandang oleh manusia yang memenuhi syarat berupa berpegang teguh pada Al-Qur'an, Sunnah Rasul dan selalu istiqamah. Inilah yang dimaksud tipikal santri secara prinsip.

Inti dari lembaga kelompok-kelompok santri ada di sekitar mesjid dan dalam pesantren. Adapun pesantren itu lebih berhasil membentuk komunitas muslim sebab bentuknya berdasarkan pola biara zaman lampau yang dirubah. Dalam pesantren itu santri-santri dari berbagai daerah tinggal bersama dalam asrama, memasak makanannya sendiri dan biasanya bekerja di sawah milik pesantren tersebut atau memiliki para pendukung pesantren itu. Jadi disekitar pesantren itulah paguyuban santru desa berkembang.<sup>16</sup>

Yang lebih berpengaruh dalam mempertahankan Islam ialah inti para mukmin yang giat, yaitu Kyai dan Ulama yang merupakan inti pola kehidupan santri. Semula

---

<sup>16</sup> Zaini Muchtarom, op.cit., h.44

peradaban santri itu rupanya terbatas pada kota perdagangan di pantai, kemudian peradaban itu menembus kedaerah pedalaman di pulau jawa. Pusat ide islam terletak dalam konsepsi *Ummah* (paguyuban islam).

Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia, ia telah hidup melalui berbagai macam pancaroba sosial, ekonomi dan politik yang terjadi di nusantara; mulai dari masa pra-kolonial, periode kolonial, hingga kemerdekaan. Lembaga ini menjadi saksi bisu bagi 2 hal penting, yaitu perkembangan Indonesia sebagai sebuah bangsa dan pertumbuhan islam sebagai agama yang di anut oleh bagian terbesar penduduk nusantara. Dalam kerangka pertama, pesantren turut memberi sumbangan penting bagi terbangunnya nasionalisme indonesia awal. Gerakan-gerakan proto-nasionalis yang dimulai bertumbuh sejak abad ke-18 banyak berhimpun di seputar pesantren dan guru-guru agama Islam. Hal itu bisa dilihat dari perang paderi di Sumatera Barat, Perang Diponegoro di Jawa Tengah (1825-1830), Gerakan Petani Banten(1888), hingga Sarekat Islam pada awal abad 20. Sedangkan dalam kerangka kedua, pesantren menjadi pusat pengembangan agama islam yang paling utama dan terlembagakan. Dalam pengembangan islam tersebut, pesantren di nusantara mengambil model yang khas dan berbeda dari islam di Timur Tengah. Pesantren menghadirkan suatu bentuk islam nusantara yang unik, namun dengan berbagai kompleksitasnya.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Andi Rahman Alamsyah, *Pesantren, Pendidikan Kewargaan, dan Demokrasi*, (Cet I, Jakarta; Badang Litbang dan Diklat Depag 2009) h.1-2

Dalam interaksi budaya lokal, pondok pesantren ini tidak mengalami hambatan, sebab budaya lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat adalah budaya lokal yang bernuansa islami, seperti dalam selamatan atau upacara siklus kehidupan, kegiatannya membaca barzanji, ratiban, yasinan, tahlil. Hal ini sejalan dengan kitab-kitab yang dikaji oleh santri pondok pesantren, selain itu, di antara materi pengajian di pondok pesantren ini adalah yasinan dan barzanji<sup>18</sup>

Untuk hal kepemimpinan, pesantren mempunyai sosok, yakni seorang *Kyai*, kepemimpinan pesantren yang kharismatik dalam pengabdianya berjasa, baik terhadap pengembangan pesantren maupun terhadap bangsa dan negara. Hal ini dikarenakan mereka telah menunjukkan keteladanannya dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga masyarakat menjadikannya sebagai tempat untuk bertanya dan berkonsultasi dalam memecahkan masalah kehidupan. Kyai merupakan cikal bakal dan elemen yang paling pokok dari sebuah pesantren. Oleh karena itu pula, kelangsungan hidup pesantren sangat tergantung pada kemampuan pesantren tersebut untuk memperoleh seorang kyai pengganti yang berkemampuan cukup tinggi pada waktu ditinggal mati kyai terdahulu. Kepemimpinan pesantren juga dilakukan melalui pembagian system kerja dikalangan santri dan kyai. Selain belajar mencari ilmu, santri di pondok pun diberi peranana untuk membantu tugas kyai. Untuk santri senior diberi tugas sebagai pengajar (*ustadz*) dalam pengajian santri junior.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Ibid, h.267

<sup>19</sup> Ibid., h.269-270

Dari jalur politik sejarah Indonesia, kaum santri memiliki beberapa *track record*, di antaranya dengan ada sebutan Politik Santri, yakni sebutan bagi kegiatan politik yang dilakukan aktivis politik dari komunitas yang selama ini dikenal lebih taat terhadap berbagai aturan dalam sistem ajaran Islam (Geertz, 1983)<sup>20</sup>. Mereka mengklaim mewakili suara mayoritas rakyat atas argumen mayoritas rakyat itu memeluk agama Islam. Namun demikian beberapa fakta politik menunjukkan bahwa kaum santri itu ternyata hampir selalu gagal merebut simpati mayoritas pemilih di sepanjang pemilu yang pernah diadakan dalam sejarah negeri ini. Di lain sisi, kaum santri meyakini dirinya sebagai kelompok yang teguh pada nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama Islam. Kebaikan moral dan keadilan yang bersumber pada nilai keagamaan merupakan tema utama yang menjadi isu kampanye partai dan politisi santri. Akan tetapi, jika kaum santri dipandang sebagai kelompok paling sadar atas pilihan politiknya di atas basis ideologi Islam, hal itu tidak seluruhnya benar dan terlihat dilapangan.<sup>21</sup> Contoh paling jelas ialah sulitnya bagi partai-partai yang mengusung romantisme Masyumi memperoleh dukungan signifikan dalam pemilu demokratis pascareformasi. Ideologi dengan corak apapun, secara akademik semestinya mewarnai partai-partai politik peserta pemilu. Namun ketika suatu partai mengklaim berbasis ideologi tertentu, program dan agenda partai itu seperti tidak

---

<sup>20</sup> Pramono U. Tanthowi, *Kebangkitan Politik Kaum Santri*, (Cet. I; Jakarta; Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2010) h. XI

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. XV

mencerminkan akar ideologisnya. Ideologi partai seringkali lebih sebagai simbol partai yang segera hilang dalam hampir keseluruhan kegiatan partai.

Islam di daerah Jawa memproklamkan eksistensinya, sejak perang Dunia I umat Islam di Indonesia sudah mulai tertarik pada masalah khilafat. Sampai pada saatnya, para ulama terkemuka di Jawa bersatu dalam 1 pertemuan di Surabaya di kediaman K.H Abdillah Wahab tahun 1926, dalam pertemuan tersebut telah diambil dua keputusan paling penting sebagai berikut:

Pertama, meresmikan dan mengukuhkan berdirinya Komita Hijaz dengan masa kerja sampai delegasi yang di utus menemui Raja Saud kembali ke tanah air

Kedua, membentuk Jam'iyah (organisasi) untuk wadah persatuan para ulama dalam tugasnya memimpin umat menuju terciptanya cita-cita izzul islam wal muslimin. Atas usul dari Alwi Abdul Aziz, Jam'iyah ini diberi nama "Nahdatul Ulama" yang artinya "Kebangkitan Para Ulama"<sup>22</sup>

Dalam perkembangannya, kaum santri tersirkulasi dalam kegiatan politik, pendekatan "*Islam Politik dan Islam Kultural*" secara elaboratif dijelaskan oleh Azyumardi Azra<sup>23</sup>. "Islam Politik" adalah Islam yang berusaha mewujudkan dan diaktualisasikan dalam kekuasaan atau kelembagaan politik resmi, sebaliknya "Islam Kultural" didefinisikan sebagai "Islam yang mewujudkan dirinya secara substantif

---

<sup>22</sup> Slamet Effendy Yusuf, *Dinamika Kaum Santri*, (Cet. I (Jakarta; CV. Rajawali) h. 19

<sup>23</sup> Azyumardi Azra, "Islam Politik dan Islam Kultural: Islam Masa Pasca Soeharto," dalam Arief Subhan (ed.), *Indonesia dalam transisi menuju Demokrasi*, (Jakarta: LSAF, 1999), h. 74-92.

dalam lembaga kebudayaan dan peradaban islam lainnya; pendeknya Islam minus politik.

Fenomena distingsi “Islam politik” dan “ Islam kultural” muncul pada masa pasca kesultanan, tepatnya pada masa kolonialisme belanda. Pola hubungan antara umat dan penguasa kesultanan yang sebelumnya bersifat simbiotik mengalami perubahan signifikan. Di satu sisi, banhyak ulama yang melakukan oposisi terbuka dan perlawanan bersenjata terhadap belanda. Jika tidak mampu menghadapi Belanda yang sanagt tangguh, mereka mengkonsentrasikan energi pada lembaga-lembaga Islam, khususnya pesantren dan tarekat. Bentuk respons yang pertama kemudian muncul sebagai gerakan “Islam Politik”, sedangkan yang kedua muncul sebagai gerakan “Islam Kultural”.<sup>24</sup>

Bahkan pada jaman Soeharto, kekuatan politik dari kaum muslim mulai di akomodasi biarpun pada awal pemerintahannya, ada hubungan tidak harmonis, seperti pendapat Dr. Imamudin Abdurrahim yang berisi “Kini, yang terjadi bukan hanya sebuah upaya presiden untuk mengamankan dukungan Muslim sehingga bisa meredam pesaing-pesaingnya di militer. Tentu saja. Terdapat ukuran-ukuran politik seperti itu, namun saya tidak terlalu sini. Saya kira presiden Soeharto mempunyai mata, ia melihat apa yang terjadi, dan Ia menyadari bahwa 90% rakyatnya adalah muslim dan mereka harus diberi peran dalam kehidupan nasional. Ini sebuah awalan murni.”

Untuk pertama kali dalam 27 Tahun kami diajak dalam kehidupan politik negeri ini, dan kai harus mengambil keuntungan darinya.Kenyataan ini mungkin tak memuaskan harapan semua orang, namun merupakan sebuah kesempatan yang nyata”<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ibid., h. 85

<sup>25</sup> Hasil wawancara Hefner dengan Dr. Imaduddin Abdurrahim tahun 1993

Meski demikian, sekalipun mengalami hubungan akomodatif dengan negara, kenyataan tersebut tidak membuat seluruh kalangan Islam kehilangan sikap kritis dan terkooptasi oleh rezim Orde Baru. Maka, diantara berbagai gerakan oposisi di Indonesia timbul dan tenggelam selama (terutama satu dekade terakhir) Orde Baru, dapat disaksikan gerakan oposisi dari para aktor pro demokrasi muslim. Mereka biasanya terdiri dari para intelektual kampus (Nurcholish Madjid), pemimpin organisasi kemasyarakatan Islam (Abdurrahman Wahid dan Amien Rais), dan aktivis partai resmi yang diakui pemerintahan (Sri Bintang Pamungkas). Yang membedakandengan aktor-aktor prodemokrasi lain, artikulasi oposisi mereka seringkali disandarkan kepada doktrin-doktrin ajaran islam yang sangat fundamental.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Pramono U. Tanthowi , *Kebangkitan Politik Kaum Santri*,(Cet. I;Jakarta;Pusat Studi Agama dan Peradaban,2010) h. 299